

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGUNGSI AFGHANISTAN DI IRAN DAN UNI EROPA

2.1 Hukum Internasional Mengenai Pengungsi

The Convention Relating to the Status of Refugees atau Konvensi Pengungsi 1951 merupakan kesepakatan PBB yang mendefinisikan siapa yang disebut pengungsi dan hak-hak individu yang mendapat suaka, termasuk negara pemberi suaka. Konvensi ini disetujui pada tanggal 28 Juli 1951 dan diberlakukan sejak 22 April 1954. Pada awalnya, konvensi ini terbatas untuk melindungi pengungsi Eropa pasca-Perang Dunia II. Hathaway menekankan (Janmyr, 2021) bahwa konvensi ini dibuat bukan untuk merespons isu pengungsi global, melainkan bersifat eurosentris dan hasil dari negara-negara adidaya yang mendominasi penyusunan konvensi ini.

Mengingat ada ketentuan “*events occurring in Europe before 1 January 1951...*” pada Konvensi 1951, ada keperluan untuk memperluas cakupan konvensi ini sesuai perkembangan zaman. Maka dari itu, dibuatlah Protokol 1967 yang menghapus restriksi geografis dan temporal dari Konvensi 1951, terkait mengenai siapa yang disebut pengungsi. Protokol ini menghilangkan kata “*As a result of events occurring before 1 January 1951 and..*” dan “*...as a result of such events*” pada Pasal 1A Ayat 2 Konvensi 1951 dalam pendefinisian pengungsi.

Pengungsi, dalam konvensi ini, adalah orang yang akibat ada rasa takut akan persekusi karena alasan-alasan, seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam

suatu kelompok atau opini politik tertentu, berada di luar negaranya atau tidak bisa atau tidak ingin menggunakan perlindungan negaranya karena adanya ketakutan-ketakutan tersebut. Sampai dengan akhir 2020, ada 149 negara yang menjadi anggota dari Konvensi 1951, Protokol 1967, atau keduanya (Janmyr, 2021).

Hak-hak yang dijamin di dalam Konvensi 1951, yaitu:

1. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam kondisi tertentu (Pasal 32);
2. Hak untuk tidak dihukum karena memasuki teritori *contracting State* (Pasal 31);
3. Hak untuk bekerja (Pasal 17-19);
4. Hak atas tempat tinggal (Pasal 21);
5. Hak untuk mengenyam pendidikan (Pasal 22);
6. Hak atas bantuan sosial (Pasal 23);
7. Hak kebebasan beragama (Pasal 4);
8. Hak atas akses ke pengadilan (Pasal 16);
9. Hak untuk berpindah di dalam teritori negara (Pasal 26); dan
10. Hak atas identitas dan dokumen untuk bepergian (Pasal 27 dan 28).

Pada konvensi ini, terdapat prinsip *non-refoulement* yang menjadi fondasi dalam perlindungan pengungsi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 Konvensi 1951 yang berbunyi:

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom

would be threatened on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

Prinsip ini melindungi pengungsi dengan melarang negara mengusir atau mengembalikan mereka ke teritori yang dapat mengancam keselamatannya. Perlindungan ini mencakup mereka yang menjadi pengungsi sesuai kriteria pada Pasal 1A Ayat 2 Konvensi 1951. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang sudah resmi menjadi pengungsi, tetapi juga untuk mereka yang belum resmi menjadi pengungsi (UNHCR, n.d.). Prinsip *non-refoulement* juga berlaku untuk para pencari suaka. Negara yang belum bisa memberi suaka kepada mereka yang mencari perlindungan internasional di teritorinya harus menempuh langkah yang tidak berujung kepada pengusiran mereka—baik langsung maupun tak langsung—ke tempat yang dapat membahayakan kehidupan mereka (UNHCR, n.d.).

Pelaksanaan prinsip ini berlaku, baik untuk negara anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967 beserta individu atau entitas lainnya maupun negara yang tidak menjadi anggota konvensi atau protokol tersebut. Berlakunya prinsip ini bagi negara anggota konvensi dan protokol tersebut dan negara nonanggota menjadikan prinsip ini bagian dari hukum kebiasaan internasional. Untuk menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, ada dua elemen yang perlu dipenuhi, yaitu *consistent State practice* dan *opinio juris*, yaitu pemahaman oleh para negara bahwa pelaksanaan pada suatu isu menjadi kewajiban karena adanya aturan yang memerlukan hal tersebut (UNHCR, n.d.). UNHCR sendiri menganggap pelarangan *refoulement* terhadap pengungsi memenuhi dua kriteria tersebut untuk menjadi aturan dalam hukum kebiasaan internasional (UNHCR, n.d.).

Komite Eksekutif UNHCR juga menjadikan prinsip *non-refoulement* sebagai perpanjangan *peremptory norm* dalam hukum internasional atau norma *jus cogens* yang menjadi prinsip dasar hukum internasional yang disepakati negara-negara sebagai hak yang tak dapat dikurangi (Rivaldi dan Farsia, 2018). Selain bersifat *jus cogens*, prinsip ini juga menjadi kewajiban *erga omnes* (Tjolleng dan Manuputty, 2017). *Erga omnes* dapat dianggap sebagai konsep penting dalam melindungi nilai-nilai dasar dan kepentingan masyarakat internasional bersama (Tanaka, 2021). Kewajiban *erga omnes* merupakan kewajiban dasar hukum internasional yang menjadi aturan yang mengikat suatu negara pada komunitas internasional (Tanaka, 2021). Aturan tersebut ada sebagai sebuah aturan hukum kebiasaan internasional (Tanaka, 2021).

Iran dan Uni Eropa merupakan anggota dari Konvensi 1951 dan Protokolnya sehingga mereka memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak pengungsi yang diatur di dalamnya. Sebagai tambahan, Uni Eropa menjamin pelaksanaan prinsip ini pada European Union Charter of Fundamental Rights.

2.2 Perkembangan Pengungsi Afghanistan

Penyebab adanya pengungsi Afghanistan utamanya adalah konflik berkepanjangan. Sebagian besar dari mereka meninggalkan negaranya karena perang, persekusi, dan genosida. Selain konflik, mereka meninggalkan negaranya karena bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir. Pada 22 Juni 2022, terjadi gempa bumi yang menewaskan lebih dari 1.000 jiwa (EUAA, 2022). Lalu, selama

bulan Juli sampai Agustus, terjadi hujan lebat disertai banjir yang menewaskan kurang lebih 131 jiwa dan menghancurkan 9.373 rumah (EUAA, 2022). Krisis-krisis tersebut yang mendorong warga Afghanistan meninggalkan negaranya untuk menjadi pengungsi. Pada tabel di bawah, Afghanistan termasuk penyumbang angka pengungsi terbesar di dunia akibat konflik-konflik yang terjadi sejak dekade-dekade sebelumnya.

Tabel 2.1 Krisis Pengungsi Terbesar di Dunia sejak 1960 Berdasarkan Puncak Angka Pengungsi

Konflik	Angka puncak pengungsi (juta)	Persentase populasi (%)
Rezim Dreg, Etiopia (1974-1991)	2.6	7%
Perang Afghanistan-Uni Soviet, Afghanistan (1979-1989)	5.6	48%
Perang saudara Afghanistan, Afghanistan (1989-1986)	6.3	52%
Rezim Taliban, Afghanistan (1996-2001)	3.8	18%
Taliban <i>insurgency</i> , Afghanistan (2002-2021)	3.1	11%
Perang saudara Suriah, Suriah (2011-sekarang)	6.9	35%
Gejolak politik Venezuela, Venezuela (2014-sekarang)	5.1	15%
Invasi Rusia ke Ukraina, Ukraina (2022-sekarang)	4	9%

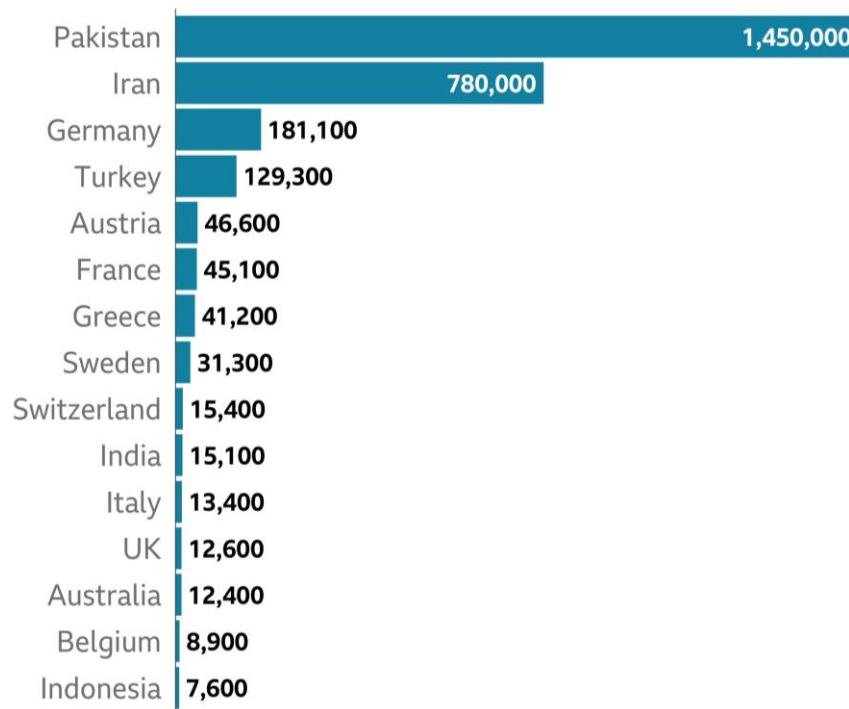
Sumber: Diolah dari Statista (statista.com)

Gelombang pertama pengungsi Afghanistan dimulai pada tahun 1978 sampai 1979, diawali oleh Revolusi Saur yang diikuti invasi Uni Soviet. Peristiwa ini memulai gelombang pengungsi Afghanistan. Rata-rata warga Afghanistan mengungsi ke negara tetangga, seperti Iran, Pakistan, dan India. Setelah invasi Uni Soviet berakhir, warga Afghanistan banyak yang kembali ke negaranya.

Gelombang baru pengungsi Afghanistan terjadi pada perang saudara periode 1992-1996 yang diikuti berkuasanya Taliban (1996-2001). Pada periode ini, kebanyakan mereka melarikan diri dari rezim Taliban. Setelah Taliban jatuh akibat serangan pasukan koalisi yang dipimpin AS, pada akhir 2001, banyak di antara mereka yang kembali ke Afghanistan (Crawley dan Kaytaz, 2022). Sejak 2001 sampai 2021, AS menempatkan militernya di Afghanistan dan konflik masih tetap terjadi pada periode tersebut antara koalisi dan milisi Taliban.

Penambahan gelombang pengungsi Afghanistan kembali terjadi di tahun 2021, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang pada April 2021, mengumumkan bahwa seluruh pasukan AS akan meninggalkan Afghanistan tanggal 11 September, dan kemudian dimajukan menjadi tanggal 31 Agustus (NBC News, 2021). Menyusul pengumuman ini, para milisi Taliban merebut kembali kontrol atas seluruh wilayah Afghanistan dan dalam sebelas hari, mereka memasuki Kabul, pada tanggal 15 Agustus yang menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi Afghanistan.

Pengungsi Afghanistan saat ini hidup di 98 negara yang berbeda-beda (USA for UNHCR, 2022). Mayoritas dari mereka hidup di negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran. Eropa, terutama negara-negara Uni Eropa juga menjadi destinasi bagi para pengungsi Afghanistan untuk bertempat tinggal.



Grafik 2.1 Negara dengan Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan Terbanyak di Tahun 2020

Sumber: BBC, 2021 (bbc.com)

Selain angka di atas, pada tahun 2021, ada 777.400 warga Afghanistan yang menjadi IDP (*internally displaced person*) yang bertambah menjadi 3,5 juta orang pada akhir 2021 (USA for UNHCR, 2022). Dari laporan UNHCR, ada sekitar 111.600 warga Afghanistan yang tiba di negara tetangga untuk mencari perlindungan sejak Januari sampai 13 Desember 2021 (Loft, 2021). Di Afghanistan sendiri, UNHCR memperkirakan ada sekitar 67.200 pengungsi dan pencari suaka per Juni 2022 (EUAA, 2022). Sejak Maret sampai April 2022, ada 111.246 orang yang tercatat meninggalkan Afghanistan (IOM, 2022).

Ada berbagai permasalahan keamanan dan hak asasi manusia yang dihadapi pengungsi Afghanistan, baik yang berada di Afghanistan maupun di luar. Menurut

Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), sekurangnya 4.125 orang tewas akibat konflik dan kekerasan sejak Agustus 2021, dengan 46 persen korban jiwa tercatat selama April sampai Agustus 2022. Korban-korban ini berjatuh akibat pertempuran antarkelompok di Afghanistan.

Masalah lainnya adalah penangkapan dan penculikan massal. Sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021, telah ditemukan seratus mayat di Provinsi Nangarhar dan Kunar (EUAA, 2022). United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) juga mencatat terjadi penangkapan massal sebanyak 40 pria dewasa dan anak laki-laki di Provinsi Baghlan, pada 16 April, dan 22 orang di Provinsi Panjshir, pada 31 Mei 2022, terhadap mereka yang diduga anggota National Resistance Front (NRF), yaitu salah satu faksi yang memerangi Taliban (EUAA, 2022).

Selain itu, wanita juga menghadapi permasalahan, seperti pemaksaan mengenakan hijab syari dan pembatasan lain dalam hal pendidikan dan mobilitas. Sejak pengambilalihan kembali oleh Taliban, UNAMA mencatat 87 laporan pembunuhan, bunuh diri, pemerkosaan, pernikahan paksa, dan kekerasan lain terhadap perempuan (EUAA, 2022). Adapun masalah lain yang dihadapi pengungsi Afghanistan di luar negaranya adalah ancaman pemulangan paksa dan diskriminasi.

2.2.1 Pengungsi Afghanistan di Iran

2.2.1.1 Sejarah Pengungsi Afghanistan di Iran

Iran merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan di sebelah timur. Kedekatannya secara geografis dan sosial budaya dengan Afghanistan menjadikan migrasi warga Afghanistan ke Iran hal yang lumrah sejak

dulu. Menurut Monsutti (dalam Crawley dan Kaytaz, 2022), migrasi warga Afghanistan ke Iran dan Pakistan merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian Afghanistan. Migrasi ini sudah terjadi sebelum munculnya konflik-konflik di Afghanistan.

Migrasi besar-besaran pertama warga Afghanistan karena konflik pertama kali terjadi pada tahun 1978, saat terjadi kudeta Marxis di Kabul yang kemudian di tahun 1979, disusul oleh invasi Uni Soviet. Menurut Abbasi-Shavazi et al (dalam Crawley dan Kaytaz, 2022), diperkirakan sekitar tiga juta pengungsi Afghanistan sudah tiba di Iran pada tahun 1989. Pada tahun 1990-an, terjadi kembali gelombang pengungsi Afghanistan ke Iran; mereka menghindari pemerintahan rezim Taliban. Setelahnya, sebagian dari mereka kembali lagi ke Afghanistan.



Gambar 2.1 Pengungsi Afghanistan Berdatangan ke Iran

Sumber: ANI News, 2021 (aninews.in)

Pada tahun 2021, terjadi kembali gelombang pengungsi Afghanistan ke Iran yang disebabkan oleh penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Krisis ini membuat

warga Afghanistan melarikan diri dari kekuasaan Taliban dan mengungsi ke negara sekitar, seperti Iran. Ada sekitar 780.000 pengungsi Afghanistan di Iran yang terdata dan kemungkinan masih ada dua juta lagi yang tak terdata (UNHCR, 2021). Sejak 1 Januari sampai dengan 23 Oktober 2021, UNHCR memperkirakan 20.341 warga Afghanistan tiba di Iran. Diperkirakan ada sekitar 300.000 warga Afghanistan yang memasuki Iran setelah pengambilalihan Taliban (NRC, 2021). Mereka terus berdatangan ke Iran melalui perbatasan tak resmi.

2.2.1.2 Kebijakan Iran terhadap Pengungsi Afghanistan

Iran merupakan anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 beserta Protokol 1967. Iran menjadi anggota dari instrumen tersebut dengan melakukan aksesi pada tanggal 28 Juli 1976. Walaupun menjadi anggota dalam konvensi dan protokol tersebut, Iran memiliki reservasi (*reservation*) terhadap ketentuan atau hak di dalamnya (United States Committee for Refugees and Immigrants, 2007).

Adapun reservasi Iran dalam Konvensi 1951 dalam dokumen UNHCR berjudul *States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol* sebagai berikut:

Iran (Islamic Republic of)

Subject to the following reservations

- 1. In all cases where, under the provisions of this Convention, refugees enjoy the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign State, the Government of Iran reserves the right not to accord refugees the most favourable treatment accorded to nationals of States with which Iran has*

concluded regional establishment, customs, economic or political agreements.

2. *The Government of Iran considers the stipulations contained in articles 17, 23, 24 and 26 as being recommendations only.*

Salah satu reservasi Iran adalah dalam hak berpindah di dalam teritori. Pemerintah Iran membatasi tempat tinggal pengungsi berdasarkan Regulasi 1963 (United States Committee for Refugees and Immigrants, 2007). Kemudian, mengenai hak untuk bekerja. Regulasi 1963 Iran mengizinkan orang asing bekerja di bidang yang disetujui untuk negara luar dan bidang yang dianggap sesuai (United States Committee for Refugees and Immigrants, 2007). Selain itu, Undang-Undang Iran Tahun 1990 Tentang Pekerja juga memerintahkan kementerian buruh dan sosial untuk mengeluarkan izin kerja untuk pengungsi dengan disetujui kementerian interior dan luar negeri. Regulasi 2004 Iran juga membatasi hak warga Afghanistan untuk mendapatkan *mortgage*, menyewa dan membeli properti dan membuka rekening bank (United States Committee for Refugees and Immigrants, 2007).

Iran membuka negaranya untuk warga Afghanistan pada tahun 1979 setelah invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Mereka dianggap sebagai saudara seiman dan didukung pula oleh pernyataan-pernyataan pemimpin Iran kala itu, Ruhollah Khomeini, yang menyatakan kepada audiensnya bahwa menerima warga Afghanistan merupakan kewajiban secara agama (Siavoshi, 2022). Penerimaan ini merupakan representasi dari semangat revolusi dan menunjukkan bahwa Iran mewakili kepentingan seluruh umat muslim yang tertindas (Siavoshi, 2022).

Kebijakan mulai berubah setelah Perang Iran-Irak (1988) dan masa kepemimpinan Presiden Rafsanjani pada tahun 1989. Pada masa ini, Iran menganggap rekonstruksi pascaperang dengan batasan teritori yang jelas penting untuk kelangsungan negara. Dari sini, mulai berkembang kebijakan migrasi yang lebih restriktif dan pendekatan ekonomi neoliberal yang membutuhkan pekerja murah; yang dapat dipenuhi oleh migran, tetapi ditentang para migran (Siavoshi, 2022). Pada tahun 1992, Iran menandatangani perjanjian repatriasi tiga pihak dengan Afghanistan dan UNHCR yang menyebabkan repatriasi lebih dari 600.000 migran pada tahun 1993 (Siavoshi, 2022). Pada masa Rafsanjani, Iran juga membatasi jumlah pengungsi. Iran juga menunda pendaftaran migran menjadi pengungsi, menarik bantuan sosial, membatasi penerimaan pekerjaan, mengejar kebijakan repatriasi, dan melarang anak-anak migran yang tak terdata bersekolah di sekolah negeri (Siavoshi, 2022).

Kebijakan yang lebih restriktif lagi dilakukan pada masa Presiden Khatami (1997-2005). Iran menandatangani perjanjian repatriasi tiga pihak pada tahun 2002. Iran juga meningkatkan pengawasan perbatasan timur, melakukan pendekatan yang lebih luas dan intensif untuk mencari dan menghukum kelompok penyelundup manusia, mengimplementasi hukum pekerja migran yang lebih restriktif, dan aktif mengumumkan kebijakan ini di media (Siavoshi, 2022). Kebijakan restriktif ini diteruskan oleh Presiden Ahmadinejad (2005-2013) yang memperketat kontrol di perbatasan timur dan membangun kamp detensi guna meregulasi, mencatat, dan mengontrol migran (Siavoshi, 2022).

Ketika Hassan Rouhani terpilih menjadi presiden pada tahun 2013, Iran menghentikan sebagian kebijakan-kebijakan restriktifnya. Salah satunya dengan memberikan visa kepada 450.000 warga Afghanistan yang sebelumnya akan dideportasi (Siavoshi, 2022). Pada tahun 2015, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menginstruksikan supaya semua anak-anak Afghanistan, baik yang terdata maupun tidak, dapat mengenyam pendidikan (Siavoshi, 2022). Kebijakan-kebijakan ini ditempuh mengingat posisi Iran yang terisolasi dan dipenuhi sanksi dari pihak internasional.

Namun, pada akhirnya, kebijakan Iran kembali kepada repatriasi setelah impian Rouhani akan pemulihan ekonomi gagal dan disertai masalah lain seperti peningkatan angka pengangguran, inflasi, pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, setelah Taliban kembali berkuasa, terjadi kembali peningkatan migrasi dari Afghanistan. Kemudian, biro untuk urusan orang dan migran asing Iran mengumumkan Iran tidak akan menerima pengungsi karena kesulitan ekonomi yang sedang mereka hadapi.

2.2.1.3 Keadaan Pengungsi Afghanistan di Iran

Berdasarkan laporan baru dari UNHCR (2021), meskipun perbatasan resmi Afghanistan-Iran ditutup, masih ada warga Afghanistan yang menyeberang ke Iran melalui perbatasan tak resmi. Dari laporan tersebut, terjadi penambahan jumlah pengungsi Afghanistan ke Iran, yaitu 20.341 pengungsi dalam rentang waktu 1 Januari hingga 23 Oktober 2021. Dari wawancara yang dilakukan UNHCR (2021) kepada 1.044 keluarga, diketahui:

1. Terdiri atas 24% pria, 31% wanita, dan 45% anak-anak;

2. Perhatian utama adalah *refoulement* (30%) dan tahanan (84%);
3. Mayoritas (84%) tidak memiliki status registrasi; dan
4. Kebutuhan yang paling diperlukan adalah akses tempat tinggal (56%), kebutuhan sehari-hari (50%), dan dokumentasi (43%).

Menanggapi hal ini, Menteri Interior Iran Ahmad Vahidi meminta pemerintah Afghanistan untuk meningkatkan kondisi dalam negeri agar warganya tidak menyeberangi perbatasan. Beliau berkata:

“We have always asked the people of Afghanistan not to come to our borders and if they have any needs, we will provide them in other ways inside Afghanistan and we hope that the rulers of Afghanistan will pay attention to this issue.” (UNHCR, 2021).

Selain itu, beliau meminta pengungsi Afghanistan untuk tidak datang ke Iran karena, *“..our capacity is limited.”* (Aljazeera, 2021). Hal senada juga dikatakan oleh Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi:

“We are hosting our Afghan brothers almost without receiving any new resources from the international community. In addition to food, shelter, medicine and education, we now provide COVID-19 vaccines to refugees while we are under severe and illegal US sanctions.” (Aljazeera, 2021).

Kedua pernyataan tersebut juga berkaitan dengan laporan dari International Organization for Migration (IOM) yang melaporkan bahwa terjadi deportasi terhadap pengungsi Afghanistan di Iran, serta perlakuan tak adil terhadap mereka (Aljazeera, 2021). Namun, kedua pejabat tersebut menyangkal dan menjamin

pengungsi Afghanistan yang datang ke Iran, serta mereka juga mengeluhkan bahwa selama ini bantuan kepada Iran untuk mengurus pengungsi Afghanistan masih kurang. Selain itu, UNHCR juga meminta pemerintah Iran untuk tetap membuka perbatasannya dengan Afghanistan.

Kehidupan pengungsi Afghanistan di Iran tidaklah mulus. Mereka menghadapi berbagai masalah, baik dari segi administrasi maupun sosial. Masalah dari segi administrasi yang paling umum adalah deportasi massal secara paksa. Deportasi massal pertama terjadi pada tahun 2007 dan masih berlanjut sampai sekarang. Pada tahun 2012, pemerintah Iran mendeportasi 1,6 juta warga Afghanistan yang tak terdata (Crawley dan Kaytaz, 2022). Di tahun 2015, Iran mendeportasi sekitar 25.000 warga Afghanistan dengan tambahan 30.000 orang kembali ke Afghanistan secara sukarela (Crawley dan Kaytaz, 2022).

Pengungsi Afghanistan di Iran juga kesulitan mengakses kebutuhan dasar hidup. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak mampu mendapatkan *amayesh*, yaitu sebuah kartu izin temporer untuk tinggal di Iran yang dapat diperbarui (Siavoshi, 2022). Dengan kartu ini, mereka mendapat izin tinggal dan akses ke kebutuhan dasar. Namun, pembuatan atau pembaruan kartu ini tidak gratis. Banyak dari mereka yang tidak mampu mendapat atau memperbaharui kartu ini kehilangan akses untuk kebutuhan dasar. Mereka yang tidak mampu secara ekonomi tak dapat mendapat atau memperbarui kartu ini tidak dapat berpindah dari satu kota ke kota lainnya dan tidak dapat ke dokter (Crawley dan Kaytaz, 2022).

Pengungsi Afghanistan juga mengalami diskriminasi dari masyarakat Iran. Mereka dianggap mengundang berbagai masalah, seperti terorisme, peredaran senjata, narkoba, kerusakan lingkungan, tingkat pengangguran yang tinggi (Crawley dan Kaytaz, 2022). Kebanyakan warga Afghanistan di Iran juga terpaksa mengambil pekerjaan dengan bayaran rendah dan dieksploitasi. Menurut Hyndman dan Gilles (dalam Crawley dan Kaytaz, 2022), pemerintah Iran juga menarik subsidi layanan kesehatan, pendidikan sekunder, dan transportasi, serta mencegah mereka membuka rekening bank dan bisnis. Salah satu realita lain yang miris adalah Pasukan Garda Revolusi Iran telah merekrut ribuan warga Afghanistan untuk berperang di Suriah dengan beberapa dari mereka dipaksa (Crawley dan Kaytaz, 2022). Beberapa diiming-imingi akan mendapat izin tinggal jika ingin bertempur di Suriah.

Keadaan pengungsi Afghanistan ini terlihat seperti paradoks: mereka dipandang sebagai saudara seiman yang teropresi, sesama penutur bahasa Persia, dan diizinkan tinggal di Iran, tetapi mereka dianggap warga yang primitif, mengambil lapangan kerja, dan menjadi subjek diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan (Crawley dan Kaytaz, 2022). Mereka dianggap berguna sebagai buruh dengan bayaran rendah. Alasan inilah yang menjadikan warga Iran membutuhkan mereka dan warga Iran tidak ingin mereka meninggalkan Iran. Namun, mereka tidak akan dibiarkan tinggal di Iran secara legal.

Realita inilah yang menjadikan pengungsi Afghanistan banyak yang memilih keluar dari Iran. Pilihannya antara kembali ke Afghanistan atau pergi ke

negara lain. Mengingat Afghanistan masih dilanda konflik, mereka lebih memilih pergi ke wilayah lain, seperti Eropa.

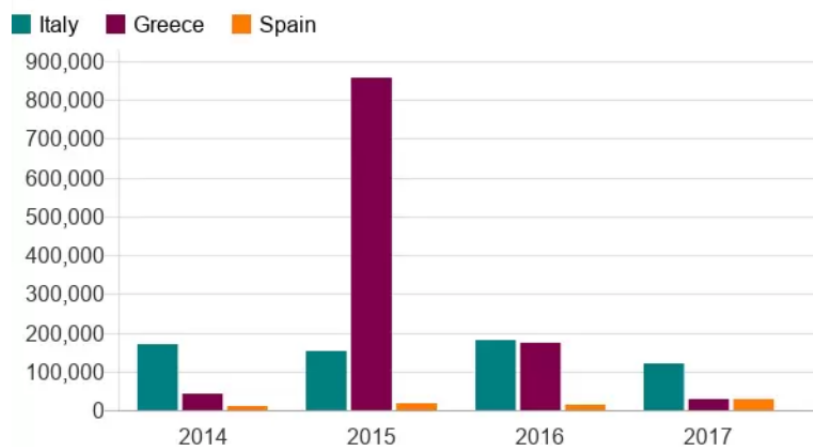
2.3 Pengungsi Afghanistan di Uni Eropa

2.3.1 Peningkatan Jumlah Pengungsi di Afghanistan di Uni Eropa

Negara-negara Uni Eropa sudah lama menjadi pihak pemberi tempat tinggal untuk para pengungsi, seperti beberapa tahun belakangan ini yang berasal dari Ukraina, Afrika, dan Asia (terutama Timur Tengah), termasuk Afghanistan. Uni Eropa adalah anggota dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang menjadikannya wajib menjamin hak pengungsi

Sejak 2010, Uni Eropa mengalami kenaikan jumlah pengungsi. Penyebabnya adalah konflik-konflik yang terjadi di luar wilayahnya, seperti Timur Tengah, Asia, dan Afrika, terutama perang di Irak, Suriah, dan Afghanistan, dan baru-baru ini adalah dari Ukraina sejak invasi Rusia. Selain itu, penyebab pengungsi berdatangan ke Eropa adalah munculnya kelompok teroris dan maraknya pelanggaran HAM di negara asal.

Pada tahun 2015, terjadi krisis pengungsi di Eropa atau yang dikenal sebagai krisis pengungsi Suriah, setelah meletusnya konflik di Suriah. Krisis ini dimulai ketika pada tahun 2014, Lebanon, Yordania, dan Mesir mulai berhenti menerima pengungsi Suriah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gelombang besar-besaran migran dan pengungsi ke Eropa.



Grafik 2.2 Kedatangan Pengungsi ke Eropa via Italia, Spanyol, dan Yunani (2014-2017)

Sumber: BBC, 2018 (bbc.com)

Peningkatan kedatangan pengungsi secara signifikan terjadi pada tahun 2015, terutama mereka yang masuk lewat Yunani. Kebanyakan pengungsi yang datang melalui Yunani berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan (BBC, 2018). Mereka memasuki Eropa melalui Laut Aegea, Turki menuju Yunani sehingga mereka sampai di wilayah Balkan, dan memasuki Uni Eropa. Selain Yunani, Italia dan Spanyol juga menjadi negara tempat para pengungsi memasuki Eropa. Di Italia, kebanyakan pengungsi berasal dari Tunisia, Eritrea, Sudan, Nigeria, dan Pakistan (BBC, 2018). Pengungsi yang berdatangan ke Spanyol rata-rata berasal dari Guinea, Maroko, Mali, Pantai Gading, Suriah, dan negara-negara Afrika di Sub-Sahara (BBC, 2018). Namun, kenaikan jumlah kedatangan pengungsi melalui Italia dan Spanyol tidak sebanyak jumlah kedatangan melalui Yunani.

Sebelum 2015, para pengungsi memasuki Eropa via Laut Mediterania dari Libya ke Italia. Rute melalui Laut Aegea dilalui oleh para pengungsi yang berasal

dari Timur Tengah, terutama Suriah, atau dari negara yang lebih jauh, seperti Afghanistan. Para pengungsi yang tiba di Mediterania sejak Januari sampai Desember 2015 mayoritas berasal dari: Afghanistan, Eritrea, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, dan Suriah (UNHCR, 2015).

Angka kedatangan tertinggi yang tercatat pada tahun 2015 adalah 1.015.078 (BBC, 2018). Namun, kedatangan pengungsi ke Uni Eropa terus menurun pada tahun-tahun berikutnya setelah Uni Eropa dan Turki menandatangani perjanjian pada tahun 2016 untuk mendeportasi migran dari Turki yang tidak mengajukan permohonan suaka atau yang permohonannya ditolak (BBC, 2018).

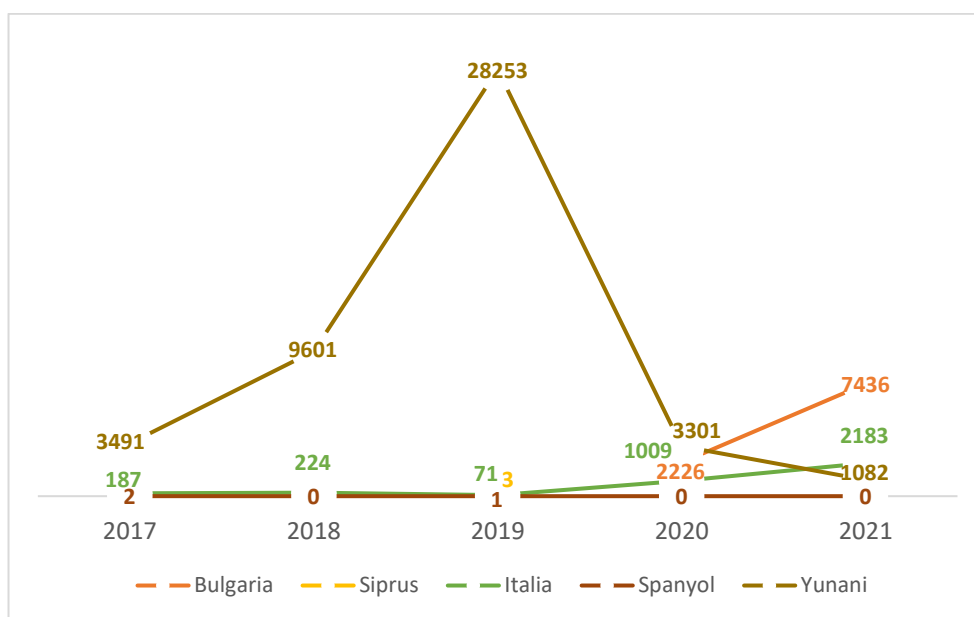
Pengurangan ini terlihat jika kita membandingkan kedatangan pengungsi sejak 2014 hingga 2017 yang tiba di Yunani, Spanyol, dan Italia pada grafik di atas. Yang paling signifikan adalah kedatangan di Yunani mengingat negara ini adalah negara tetangga Turki. Selain itu, *push back operations* dan pembangunan tembok dengan kawat berduri perbatasan juga berperan dalam berkurangnya kedatangan pengungsi ke Eropa melalui ketiga negara tersebut.

Berdasarkan data UNHCR, pada akhir 2021, negara-negara Eropa menampung sekitar lebih dari tujuh juta orang; meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya. Negara-negara Uni Eropa yang banyak menampung pengungsi, yaitu Jerman (79.700), Prancis (51.000), dan Italia (21.100) (UNHCR, 2022).

Lalu, sejak Februari 2022, Uni Eropa menerima pengungsi dari Ukraina akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Menurut data European Commission (2022), sejak 24 Februari sampai 29 November 2022: empat juta warga Ukraina

mengajukan perlindungan sementara di Uni Eropa; 701.119 anak Ukraina telah terintegrasi dengan sekolah-sekolah di negara anggota Uni Eropa; 25.70 permohonan suaka oleh warga Ukraina ke Uni Eropa; dan terdapat 6,5 juta *internally displaced person* di Ukraina; tiga juta di antaranya adalah anak-anak.

Eropa juga turut menjadi tujuan para pengungsi Afghanistan. Mereka memasuki negara-negara anggota Uni Eropa melalui rute darat dan laut. Pengungsi Afghanistan yang tiba pertama kali di Eropa melalui jalur darat, biasanya memasuki Bulgaria dan Spanyol. Untuk rute laut, negara Eropa yang pertama dicapai pengungsi Afghanistan adalah Siprus, Italia, Spanyol, dan Yunani.



Grafik 2.3 Kedatangan Warga Afghanistan ke Eropa Lewat Laut dan Darat (via Bulgaria, Siprus, Italia, Spanyol, dan Yunani) (2017-2021)

Sumber: Diolah dari Displacement Tracking Matrix (IOM, 2021)

Berdasarkan grafik di atas, beberapa negara yang mengalami peningkatan jumlah kedatangan warga Afghanistan, seperti Bulgaria dan Italia. Bulgaria hanya

mencatatkan angka kedatangan pada 2020 dan 2021. Dalam waktu setahun, kedatangan warga Afghanistan meningkat dari 2.226 menjadi 7.345. Lalu, temuan terbaru dari IOM (2022) melaporkan bahwa ada 2.760 kedatangan migran baru ke Bulgaria pada kuartal kedua 2021. Angka tersebut dari dua kali angka kedatangan migran pada kuartal 2021. 56 persen dari angka kedatangan migran pada kuartal kedua 2022 tersebut adalah warga berkebangsaan Afghanistan (IOM, 2022).

Kedatangan warga Afghanistan ke Italia terus mengalami peningkatan sejak 2017 yang awalnya hanya 187 menjadi 2.183 pada 2021. Pada kuartal kedua 2022, Italia juga mengalami peningkatan angka kedatangan migran dan pengungsi via laut yang mencapai 20.801 atau meningkat 59 persen dari kuartal kedua 2021 (IOM, 2022). Mereka berasal dari Bangladesh (17%), Mesir (15%), Tunisia (15%), Afghanistan (13%), Suriah (3%), dan negara lainnya (IOM, 2022). Pada periode Januari-Juni 2022, tercatat 3.280 kedatangan migran dan pengungsi Afghanistan ke Italia lewat laut dari Turki atau Yunani (IOM, 2022). Angka ini merupakan peningkatan 706 persen dibanding paruh pertama 2021 (IOM, 2022).

Di negara lain, seperti Spanyol dan Siprus angka kedatangan warga Afghanistan tidaklah banyak. Spanyol hanya mencatatkan dua kedatangan dan satu kedatangan masing-masing pada 2017 dan 2019. Untuk Siprus, angka kedatangan warga Afghanistan hanya tercatat pada tahun 2019, yaitu tiga kedatangan.

Lalu, angka kedatangan warga Afghanistan di Yunani sempat mencapai puncaknya pada tahun 2019 yang mencapai 28.253. Di tahun 2021, angka ini hanya mencapai 1.082 atau lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 3.301. Akan

tetapi, pada kuartal kedua 2022, terjadi 4.050 kedatangan migran dan pengungsi (IOM, 2022). Angka ini dua kali lebih tinggi pada kuartal kedua 2021 yang hanya mencapai 1.963 atau dengan kata lain, terjadi peningkatan 106 persen (IOM, 2022). 46 persen kedatangan tersebut tercatat berasal dari Turki (IOM, 2022). Dari 4.050 angka kedatangan itu, mayoritas berasal dari Afghanistan atau sekitar 7 persen dari total angka kedatangan (IOM, 2022).

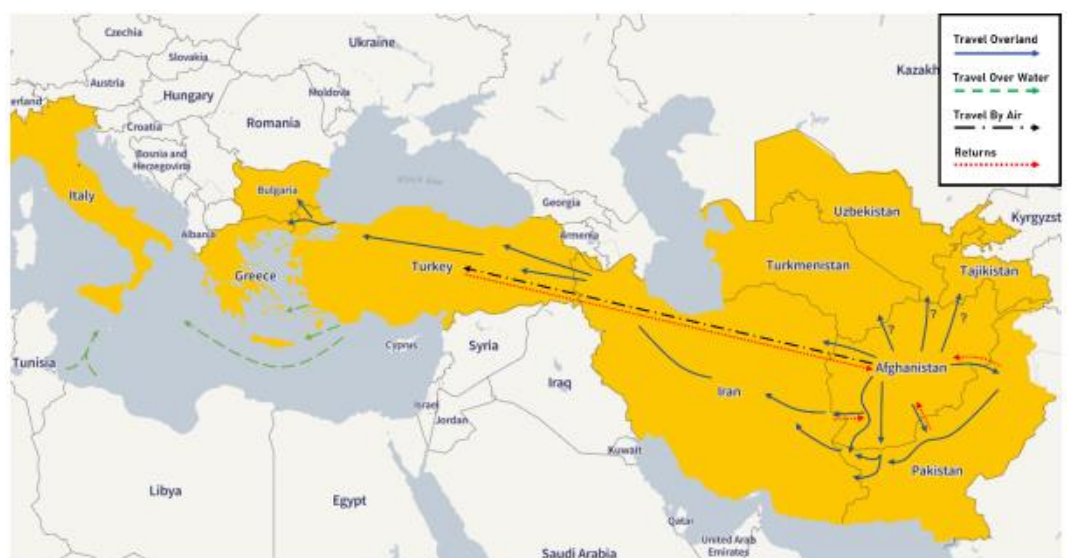


Gambar 2.2 Kedatangan Pengungsi Afghanistan di Yunani via Laut

Sumber: Foreign Policy, 2021 (foreignpolicy.com)

Pada periode Januari—Juni 2022, terjadi kedatangan 365 warga Afghanistan ke Yunani lewat laut yang menjadikannya 11 persen dari total kedatangan (IOM, 2022). Namun, angka ini 51 persen lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (IOM, 2022). Afghanistan juga menjadi kewarganegaraan pertama (*first nationality*) para migran dan pengungsi yang diterima di Yunani, yaitu 5.023 atau 41 persen dari yang terdaftar (IOM, 2022).

Sebelum menuju ke Eropa, warga Afghanistan pada umumnya melarikan diri ke negara tetangga, salah satunya adalah Iran. Mereka tak jarang memilih untuk tidak menetap di Iran dan memilih pergi. Hal ini tak lepas dari segala kesulitan dan diskriminasi yang mereka hadapi di Iran. Crawley dan Kaytaz (2022) menggambarkan kondisi pengungsi Afghanistan di Iran sebagai *between a rock and hard place*; mereka tidak bisa kembali ke Afghanistan dan tak mampu berkehidupan layak di Iran. Iran juga menjadi salah satu rute penting bagi pengungsi Afghanistan untuk menuju Eropa.



Gambar 2.3 Rute yang Ditempuh Pengungsi Afghanistan (April—Agustus 2022)

Sumber: European Union Agency for Asylum, 2022

Pada umumnya, pengungsi Afghanistan akan melewati Iran, kemudian melanjutkan perjalanan ke Turki untuk mencapai Yunani via darat atau laut. Mereka juga memasuki Uni Eropa lewat wilayah Balkan. Selain itu, mereka bisa saja menuju Italia dari Turki via jalur laut.

Bersamaan dengan pengambilalihan Taliban di Afghanistan, penyeberangan ilegal pada Agustus-September 2021 meningkat tajam (EUAA, 2022). Pada tahun 2021, 74 persen deteksi yang melibatkan warga Afghanistan terjadi di rute Balkan menuju Uni Eropa (EUAA, 2022). Selain melalui rute itu, tercatat 3.309 kedatangan warga Afghanistan ke Italia dengan kapal (rute laut) antara 1 Januari sampai 31 Juli 2022 (EUAA, 2022). Puncak kedatangan warga Afghanistan terjadi pada Mei dan Juni yang masing-masing sebanyak 1.239 dan 1.102 kedatangan (EUAA, 2022).

Per April 2022, lebih dari 230.000 warga Afghanistan diperkirakan sudah dievakuasi atau dipindahkan ke negara lain; 27.000 di antaranya ke negara-negara Uni Eropa (EUAA, 2022). Menurut Frontex, sekitar 13.369 terdeteksi menyeberangi perbatasan Uni Eropa pada Januari sampai Mei 2022 (EUAA, 2022). Angka ini meningkat 316 persen dari tahun sebelumnya.

Dari sini, terlihat bahwa fenomena penambahan migran dan pengungsi mulai terjadi beberapa tahun belakangan, terutama sejak konflik Suriah. Migran dan pengungsi yang melarikan diri ke Eropa berasal dari negara konflik di Timur Tengah, Afrika, dan baru-baru ini adalah Ukraina. Untuk mencapai Eropa, mereka menempuh jalur laut atau darat. Salah satu negara yang turut menyumbang kedatangan migran dan pengungsi ke Eropa adalah Afghanistan.

Berdasarkan data-data sebelumnya, beberapa negara anggota Uni Eropa mengalami penambahan angka kedatangan warga Afghanistan, terutama pada tahun 2019 atau 2020. Angka kedatangan migran dan pengungsi di kuartal kedua

2022 juga mengalami peningkatan dan Afghanistan juga turut menyumbang asal negara terbanyak pada angka tersebut. Akan tetapi, angka ini lebih rendah dibanding tahun 2015-2016 (IOM, 2022).

Krisis di Afghanistan pada Agustus 2021 memang tidak berdampak signifikan terhadap mobilitas di Laut Mediterania (IOM, 2022). Namun, angka kedatangan warga Afghanistan melalui laut dan darat via Mediterania Barat dan Tengah (Italia, Bulgaria, dan Yunani) pada paruh pertama 2022 3,5 kali lebih tinggi dibanding periode yang sama di 2021 (IOM, 2022).

Selain itu, terdapat fakta bahwa diperkirakan ada 134.183 migran, pengungsi, dan pencari suaka yang berada di di Italia, Yunani, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Siprus, Rumania, Kroasia, Slovenia, Montenegro, Makedonia Utara, dan Kosovo (IOM, 2022). Angka ini dua persen lebih tinggi dibanding akhir kuartal keempat 2021, yaitu 131.281 (IOM, 2022). Temuan inilah yang menjadikan penambahan migran dan pengungsi di Uni Eropa akan tetap menjadi isu penting.

2.3.2 Respons dan Kebijakan Uni Eropa terhadap Pengungsi Afghanistan

Penambahan jumlah pengungsi Afghanistan di Uni Eropa tentu mengundang reaksi beragam dan menjadikan Uni Eropa merasa perlu membuat kebijakan terkait pengungsi. Respons Uni Eropa terkait pengungsi pada umumnya adalah dengan kebijakan meregulasi hak-hak untuk mencari suaka di Uni Eropa dan melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga atau negara yang menampung pengungsi (Pace dan Bilgic, 2017). Respons warga Uni Eropa terhadap migran yang juga termasuk pengungsi terlihat pada survei Special Eurobarometer

European Commission mengenai imigran pada tahun 2021. Beberapa temuan pada survei tersebut, yaitu:

1. 68% responden melebihkan perkiraan proporsi jumlah imigran di negara mereka;
2. 36% responden berpendapat lebih banyak imigran ilegal di negaranya dibandingkan imigran legal;
3. 40% responden berinteraksi dengan imigran setiap minggu;
4. Mayoritas warga Eropa merasa nyaman berinteraksi dengan para imigran;
5. 69% responden setuju negaranya mengintegrasikan para imigran dan 53% responden setuju pemerintahnya telah melakukannya dengan baik; dan
6. 38% responden melihat imigran sebagai peluang sekaligus masalah.

Pada survei ini, terdapat tren negatif dan positif. Tren negatif pada survei ini disebabkan oleh banyaknya warga Uni Eropa yang kurang terinformasi dengan baik mengenai imigrasi dan isu-isu integrasi (European Commission, 2022) yang salah satunya menyebabkan mereka melebihkan jumlah imigran di negara mereka. Mengenai interaksi dengan para imigran, warga Uni Eropa sendiri sudah familiar berinteraksi dengan imigran, entah sebagai teman, dokter, keluarga, dan kolega. Para imigran juga dapat menjadi tantangan dan peluang dalam integrasi dengan masyarakat Uni Eropa. Mereka diharapkan mengadopsi nilai-nilai masyarakat setempat, membayar pajak, dan berbahasa sesuai negara mereka berada (European Commission, 2022). Namun, masih terdapat tantangan untuk mengintegrasikan

mereka, seperti kesulitan mencari pekerjaan, diskriminasi, dan potret buruk di media massa.

Di sisi lain, para pengungsi dan imigran juga menyebabkan masalah sosial, terutama kriminalitas. Contohnya adalah terjadinya lonjakan kasus kekerasan seksual di penjuru Jerman pada akhir tahun 2015 hingga perayaan tahun baru 2016. Lonjakan ini didahului oleh kebijakan Jerman yang membuka negaranya untuk migran dan pengungsi, Salah satu kota terjadinya adalah di Koln. Kepolisian setempat melaporkan 80 kekerasan seksual terhadap wanita (BBC, 2016). Selain itu, 1.000 pria mabuk dilaporkan melakukan penyerangan kepada wanita di stasiun pusat kota (BBC, 2016). Para pelaku berpenampilan layaknya warga Arab atau Afrika Utara. Masalah ini dinilai juga merupakan dampak buruk dari kebijakan terbuka yang dikeluarkan Jerman (Ghifari, 2018).

Uni Eropa juga memberi perlakuan berbeda kepada pengungsi dari Ukraina dan pengungsi negara lain. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, banyak warga Ukraina yang mengungsi ke Uni Eropa. Pengungsi Ukraina diperlakukan lebih spesial, seperti dipermudah dalam mencari kerja, fasilitas kesehatan, dan diberi tempat tinggal di hotel dan dormitori secara gratis (NPR, 2022). Di sisi lain, migran dan pengungsi dari Suriah dan negara-negara Afrika hanya tinggal di kamp dan tidak diperbolehkan bekerja (NPR, 2022). Lalu, Uni Eropa juga membangun penghalang dan tembok-tembok perbatasan supaya mereka tidak masuk.



Gambar 2.4 Tentara Polandia Memasang Kawat Berduri di Perbatasan dengan Belarusia untuk Menghentikan Penyeberangan Ilegal

Sumber: BBC, 2021 (bbc.com)

Sejak 1990, Uni Eropa telah membatasi kebebasan bergerak para pencari suaka di dalam wilayah Uni Eropa melalui Konvensi Dublin I, II, dan III. Regulasi-regulasi tersebut menjadikan para pencari suaka harus menetap di negara anggota yang mereka masuki terlebih dahulu (Pace dan Bilgic, 2017).

Lalu, dengan kebijakan ini, muncul permasalahan mengenai adanya negara-negara anggota yang memikul beban menampung pengungsi lebih banyak. Hal ini juga menciptakan xenofobia dan kebijakan rasis, seperti yang dilakukan oleh Hungaria. Hungaria mengeluarkan kebijakan yang dianggap untuk melindungi “peradaban Eropa” dari terorisme dan “kelompok barbar baru” dalam isu ini (Pace dan Bilgic, 2017). Hal ini juga memunculkan gelombang sayap kanan di negara-negara Uni Eropa yang mana mereka menolak “orang asing” masuk ke negaranya.

Kebijakan lainnya adalah militerisasi perbatasan dan laut terluar. Contohnya adalah pembangunan tembok kawat berduri oleh Spanyol dengan

pendanaan Uni Eropa; koordinasi militer oleh Frontex di Mediterania untuk menemui perahu-perahu yang membawa migran (Pace dan Bilgic, 2017). Namun, migran-migran yang dibawa oleh perahu itu banyak yang tidak mencapai Uni Eropa; disuruh kembali lewat “*push back*” operations atau dibiarkan saat menghadapi cuaca atau kondisi ekstrem yang sering mengakibatkan korban jiwa. Hal ini secara tidak langsung menghilangkan hak mereka untuk mencari suaka. Meskipun begitu, Uni Eropa juga mengintegrasikan pendekatan kemanusiaan dengan tujuan menyelamatkan nyawa manusia akibat meningkatnya korban jiwa lewat operasi yang teregulasi dan didanai (Pace dan Bilgic, 2017). Namun, kebijakan ini juga tidak menghasilkan dampak yang signifikan (Pace dan Bilgic, 2017).

Dalam usaha membatasi pengungsi, “kartu pengungsi” juga digunakan Uni Eropa dalam kebijakan eksternalnya. Pada tahun 2016, Uni Eropa-Turki menyepakati kesepakatan guna mencegah penambahan pengungsi dari Turki ke Uni Eropa dengan timbal balik Turki mendapat bantuan finansial dari Uni Eropa, pengecualian visa bagi warga Turki ke Uni Eropa, dan mempercepat proses bergabungnya Turki ke Uni Eropa (Mencutec et al., 2021).

Contoh lainnya adalah kesepakatan dengan Nigeria, Mali, Etiopia, dan Senegal yang bertujuan mendeportasi migran dan pengungsi dengan menggunakan ancaman “bantuan kemanusiaan” (Pace dan Bilgic, 2017). Negara-negara tersebut menyepakati kerja sama dengan Uni Eropa supaya mereka membatasi migrasi dengan imbalan paket bantuan dana kemanusiaan. Negara-negara anggota, seperti Jerman dan Italia juga mengeluarkan kebijakan serupa. Jerman mengalokasikan

dana 12 juta euro dengan menysar migran dari Afrika yang menjadikan Sudan sebagai rute menuju Eropa (Pace dan Bilgic, 2017). Italia, pada Agustus, 2016, mencapai kesepakatan dengan Sudan untuk mencegah migrasi yang tiga bulan kemudian berbuah hasil, yaitu deportasi warga negara Sudan yang mencoba memasuki Italia lewat Prancis (Pace dan Bilgic, 2017).

Kebijakan Uni Eropa terkait migrasi warga Afghanistan biasanya dilakukan dengan skema JWF (Joint Way Forward) yang bertujuan untuk mencegah migrasi gelap, pemulangan imigran gelap ke Afghanistan, terutama mereka yang tidak memenuhi syarat untuk tinggal di wilayah Uni Eropa (Quie dan Hakimi, 2020). JWF yang ditandatangani pada 2016 lalu oleh Afghanistan dan Uni Eropa menghadapi tantangan akibat ketidakpastian politik di Afghanistan. Selain itu, Uni Eropa juga mendukung pemulangan dan reintegrasi migran dan *internally displaced person* yang berada di luar Eropa, termasuk dengan membantu pengungsi Afghanistan yang ada di Pakistan dan Iran (Quie dan Hakimi, 2020).

Menyusul krisis di Afghanistan pada tahun 2021, negara-negara Uni Eropa berusaha mencegah terulangnya krisis pengungsi yang terjadi di tahun 2015. Prancis, yang mengevakuasi 2.800 orang dari Bandara Kabul (mayoritas warga Afghanistan), mengindikasikan akan tetap menerima pengungsi tanpa berapa jumlah spesifik yang akan diterima (BBC, 2021). Hal yang sama juga berlaku bagi Jerman. Uni Eropa menanggukkan kebijakan pemulangan warga Afghanistan yang sudah berada di teritorinya (PISM, 2021). Hal ini juga berdampak terhadap naiknya penerimaan warga Afghanistan yang mencari perlindungan di Uni Eropa dari 31 persen di 2017 mencapai 64 persen di 2021 (EUAA, 2022).

Di sisi lain, Austria dan Polandia mengatakan tidak akan menerima kedatangan warga Afghanistan dan akan memperketat keamanan di perbatasan untuk mencegah kedatangan secara ilegal (BBC, 2021). Hal ini dimaksudkan guna mencegah masuknya migran ilegal masuk ke negaranya